

ABSTRAK

Pada tanggal 3 September 2017, Korea Utara mengklaim bahwa negaranya telah berhasil meluncurkan *Inter Continental Ballistic Missile* (ICBM). Percobaan senjata termonuklir tersebut menuai respon keras dari DK-PBB dengan dijatuhkannya Resolusi Nomor 2375 (S/RES/2375) kepada Korea Utara. Kemudian, dilakukan penelitian untuk mengetahui alasan penjatuhan resolusi tersebut dan menganalisis implikasi hukum, ekonomi dan politik dari resolusi tersebut bagi Korea Utara. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang mengacu pada hukum dan peraturan yang berlaku, serta menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai. Hasilnya dianalisis secara kualitatif. Alasan DK-PBB menjatuhkan S/RES/2375 adalah dikarenakan tindakan Korea Utara telah dinilai sebagai bentuk pelanggaran perdamaian dan keamanan dunia. Adapun implikasi hukum atas S/RES/2375 tersebut adalah Korea Utara akan dijatuhkan sanksi lebih berat sesuai dengan Bab VII Piagam PBB. Selain itu juga dapat ditanggguhkan hak-haknya (Pasal 5 Piagam PBB) dan sanksi dikeluarkannya Korea Utara dari keanggotaan PBB (Pasal 6 Piagam PBB), apabila tidak mentaati dan melaksanakan sanksi tersebut. Sedangkan implikasi ekonominya adalah secara tidak langsung adanya perbaikan ekonomi di Korea Utara. Sementara, implikasi politiknya adalah adanya upaya unifikasi Korea dengan disepakatinya Deklarasi Panmunjom.

(Kata Kunci:DK-PBB, Penegakan Resolusi, Korea Utara)

ABSTRACT

On September 3, 2017, North Korea claimed that the country had successfully launched the Intercontinental Ballistic Missile (ICBM). The thermonuclear weapons experiment drew a strong response from the UNSC with the passing of Resolution Number 2375 (S / RES / 2375) to North Korea. Then, a study was conducted to find out the reasons for the resolution and to analyze the legal, economic and political implications of the resolution for North Korea. This research was conducted using a juridical-normative approach that refers to applicable laws and regulations, and examines the law as a rule that is considered appropriate. The results were analyzed qualitatively. The reason the UN Security Council dropped S / RES / 2375 was because North Korea's actions had been judged as a form of violation of world peace and security. The legal implications of the S / RES / 2375 is that North Korea will impose heavier sanctions in accordance with Chapter VII of the UN Charter. Rights can also be suspended (Article 5 of the UN Charter) and sanctions exclude North Korea from membership of the UN (Article 6 of the UN Charter), if they do not comply with and implement these sanctions. While the economic implications are indirect economic improvement in North Korea. Meanwhile, the political implication is Korea's unification effort with the approval of the Panmunjom Declaration.

(Keywords: UN Security Council, Enforcement of Resolution, North Korea)